

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

*INFLUENCE OF THE GENERAL ALLOCATION FUND (GAF) AND SPECIAL ALLOCATION FUND (SAF)
AGAINST THE REGIONAL EXPENDITURE IN NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Claudia Salindeho¹

^{1,23}Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

salindeho_claudia@yahoo.com

Abstrak: Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan otonomi memberikan respon yang beragam antar satu daerah dengan lainnya. Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama, dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan/transfer kepada pemerintah daerah. Dana transfer tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat untuk bisa memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan setiap program kerja daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara dengan mengambil data dari laporan realisasi APBD untuk tahun periode 2010–2014. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Secara simultan atau bersamaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Daerah

Abstrack: Regional autonomy according to law No. 32 of 2004 is a right, authority, and obligation of autonomous regions to set up and take care of her own affairs of Government and the interests of the community in accordance with the legislation in force. The policy autonomy of response varied between one regions with another. Not all areas have the same readiness, due to the low level of fiscal capacity. To resolve this issue, the Central Government provides equalization funds/transfers to local governments. The transfer of funds was the Central Government's help to be able to provide convenience to local governments in carrying out any work program areas. Equalization Fund consists of funds for the results (DBH), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK). This research was conducted in the province of North Sulawesi by taking data from the report on realization of the BUDGETS for the period 2010 – 2014. As for the purpose of this research is to know how to influence the general allocation funds and special allocation funds against regional expenditures in North Sulawesi province. Methods of data analysis used is the method of multiple linear regression analysis. The results showed that the General Allocation Funds influential significantly to regional expenditures in North Sulawesi province, while a Special Allocation Funds do not affect significantly to regional expenditures in North Sulawesi province. Simultaneously or concurrently the General Allocation Funds and the Special Allocation Funds effect significantly to regional expenditures in North Sulawesi province.

Keywords : General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan otonomi memberikan respon yang beragam antar satu daerah dengan lainnya. Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama, dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan/transfer kepada pemerintah daerah. Dana transfer tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat untuk bisa memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan setiap program kerja daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

Mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Menurut Abdul Halim (2012:5) akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Standar Akuntansi Sektor Publik

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah.

SAP berbasis Akruwal adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan (Riyanto & Puji Agus, 2015:13).

SAP berbasis Kas Menuju Akruwal, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruwal.

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). APBD merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan organisasi pada suatu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter (Rendy Prakoso, 2011).

Fungsi APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Struktur APBD

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, yang dimaksud dengan struktur APBD adalah suatu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah;
- b. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah;

Pembiayaan adalah meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Siswanto Sunarno, 2016:90).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun contoh DAU yaitu, belanja pegawai, pembiayaan pembangunan infrastruktur, dll (Tri Hartitik, 2014).

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2012):

- a. Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan juga untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Sunarno, 2016:79).

Mekanisme Pengalokasian DAK

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah (Halim, 2012).

Penggunaan DAU dan DAK

Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Abdul Azis, 2014).

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun (Abdul Azis, 2014).

Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (dalam Erlina, 2008). Ollukayode (dalam Inuwa, 2012) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian.

Penelitian Terdahulu

Tri Hartitik (2014) dengan judul Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk menganalisis Pengaruh DAU, DAK, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja daerah. Ni Luh, dkk (2014) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal pada Kabupaten Buleleng. Untuk memperoleh eksplanasi yang teruji tentang pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal. Hapid, dkk (2015) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu. Untuk mengetahui Pengaruh DAK, DBH dan DAU terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2013:3).

Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengambilan data yaitu, data yang diperlukan diambil dari catatan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pengolahan data yaitu, suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data, tabulasi data dan penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap sesuai yang diperlukan.
3. Penyajian data yaitu, data dilakukan menggunakan teknik statistik.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Menurut Sugiyono (2013:200) ada dua jenis data, yaitu:

1. Data Kuantitatif adalah penelitian yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka).
2. Data Kualitatif adalah penelitian yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian.

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data kuantitatif, yaitu data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah.

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013:205), sumber data terdiri dari:

1. Data Primer, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru.
2. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan/dokumen peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Keperpustakaan, yaitu untuk menggunakan data yang diperoleh dari tulisan-tulisan buku maupun karya ilmiah.
2. Penelitian Lapangan berupa :
 - a. Interview, yaitu tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.
 - b. Observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai objek penelitian yaitu DAU dan DAK pemerintah daerah.
3. Pengambilan data, yaitu data DAU, DAK, dan Belanja Daerah, serta data-data lain yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Regresi Linear Berganda, adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Model Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{DAU} + \beta_2 \text{DAK} + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU)

β_2 = Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAU = Jumlah DAU

DAK = Jumlah DAK

e = error

2. Uji Asumsi Klasik, uji ini digunakan untuk mengetahui bahwa model regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat disebut sebagai model yang baik maka harus diuji dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
3. Uji R^2 (Koefisien Determinasi), uji koefisien determinasi berganda (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas yaitu jumlah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam menjelaskan pengaruh terhadap belanja daerah sebagai variabel terikat. R^2 memiliki nilai antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), dimana bila semakin tinggi nilai R^2 maka suatu regresi tersebut akan semakin baik.
4. Uji-t, merupakan pengujian signifikansi secara parsial (individu) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1) yaitu, Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu Belanja Daerah dan variabel independen (X_2) yaitu, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu Belanja Daerah.
5. Uji-F, merupakan pengujian signifikansi secara simultan (serempak) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara serempak/bersamaan terhadap variabel dependen (Y) yaitu Belanja Daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Ringkasan dari Data Penelitian yang didapat adalah :

Tabel 1. Ringkasan Anggaran DAU, DAK, dan Belanja Daerah Tahun 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
DAU	3,879,815,524,000	4,408,610,009,000	5,156,612,237,000	5,839,297,472,000	6,431,940,155,000
DAK	603,237,075,000	695,315,140,000	645,453,450,000	783,840,370,000	863,996,143,000
BD	5,813,935,642,000	7,049,800,754,000	6,752,418,595,000	8,149,238,440,000	9,360,801,312,000

Sumber: Hasil pengolahan data, 2016.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah (BD) memiliki jumlah yang cukup signifikan di dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki jumlah relatif kecil. Jumlah Dana Alokasi Umum dari tahun 2010-2014 memiliki peningkatan di setiap tahunnya, sedangkan jumlah Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah memiliki jumlah yang naik turun yaitu di tahun 2010-2012 kemudian meningkat pada tahun 2013 dan tahun 2014.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
DAU	75	342883671960.00	112983303537.394	161163767000	729213779000
DAK	75	47891229040.00	17332317848.845	20799100000	121138950000
BelanjaDaerah	75	502200512613.33	189873549311.221	231986838000	1283771875000

Sumber : Hasil pengolahan data, 2016.

Berdasarkan hasil dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 75, dimana rata-rata jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) / (X_1) sebesar Rp. 342,8 Milyar, standar deviasi sebesar Rp. 112,9 Milyar, nilai minimum Rp. 161,1 Milyar, dan nilai maksimum sebesar Rp. 729,2 Milyar. Rata-rata jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) / (X_2) sebesar Rp. 47,8 Milyar, standar deviasi sebesar Rp. 17,3 Milyar, nilai minimum sebesar Rp. 20,7 Milyar, dan nilai maksimum sebesar Rp. 121,1 Milyar. Sedangkan Belanja Daerah (Y) memiliki jumlah rata-rata sebesar Rp. 502,2 Milyar, standar deviasi sebesar Rp. 189,8 Milyar, nilai minimum sebesar Rp. 231,9 Milyar, dan nilai maksimum sebesar Rp. 1,2 Triliyun.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		DAU	DAK	BelanjaDaerah
N		75	75	75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	342883671960.00	47891229040.00	502200512613.33
	Std. Deviation	112983303537.394	17332317848.845	189873549311.221
	Most Extreme Differences			
Absolute	Positive	.102	.134	.130
	Negative	.102	.134	.130
	Test Statistic	.057	.075	.097
Asymp. Sig. (2-tailed)	.102	.134	.130	
		.053 ^c	.002 ^c	.003 ^c

Sumber : Hasil pengolahan data, 2016.

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil dari tabel 3 maka dapat disimpulkan bahwa residual error data terdistribusi dengan normal terhadap variabel Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

a. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DAU	.845	1.184
	DAK	.845	1.184

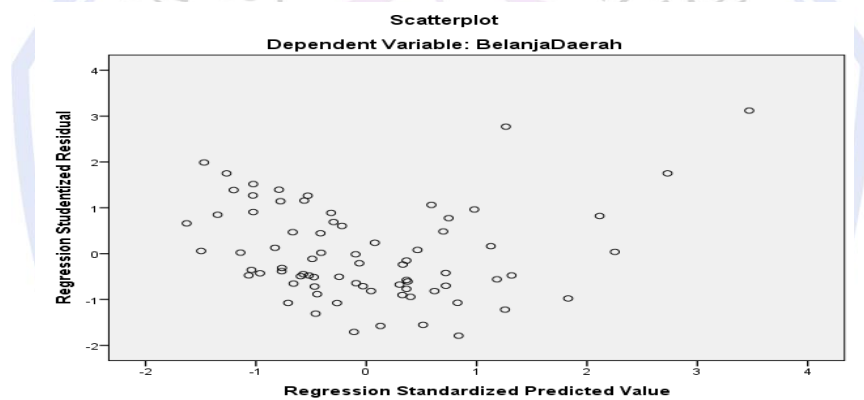
Sumber : Hasil pengolahan data, 2016.

a. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Berdasarkan hasil dari tabel 4 menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF menunjukkan < 10, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi multikolinieritas sehingga bisa dikatakan bahwa variabel dependen yaitu belanja daerah tidak berpengaruh terhadap multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil pengolahan data, 2016.

Berdasarkan gambar 1 menjelaskan bahwa pola-pola yang terjadi menyebar secara acak dan tersebar dengan baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini dapat menjelaskan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah.

a. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.175

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Sumber: Hasil pengolahan data, 2016.

Berdasarkan hasil dari tabel 5 angka Durbin Watson menunjukkan nilai 1,175 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak memiliki masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-39179583457.475	22281407596.806		-1.758	.083
	DAU	1.642	.059	.977	27.691	.000
	DAK	-.449	.386	-.041	-1.162	.249

Sumber: Hasil pengolahan data, 2016.

a. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 22.0, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

$$Y = -39,179 + 1,642_{DAU} - 0,449_{DAK}$$

$a = -39,179$ adalah bilangan konstanta yang berarti apabila variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sama dengan nol, maka besarnya Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar -39,179.

$b_1 = 1,642$ adalah besarnya koefisien regresi variabel X_1 (DAU) yang berarti setiap terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum maka, variabel Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat sebesar 1,642.

$b_2 = -0,449$ adalah besarnya koefisien regresi variabel X_2 (DAK) yang berarti setiap terjadi kenaikan Dana Alokasi Khusus maka, variabel Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara akan menurun sebesar 0,449.

Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi

Tabel 7. Hasil Analisis Korelasi dan Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.961 ^a	.924	.922	52951273269.829

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Sumber: Hasil pengolahan data, 2016.

Berdasarkan hasil dari tabel 7 nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan 0,961 yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,924 ini berarti variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki kontribusi sebesar 92,4% terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah.

Analisis Uji t**Tabel 8. Hasil Uji t Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)					
		-39179583457.475	22281407596.806		-1.758	.083
	DAU	1.642	.059	.977	27.691	.000
	DAK	-.449	.386	-.041	-1.162	.249

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Hasil pengolahan data, 2016.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai positif terhadap Belanja Daerah, hal ini dikarenakan nilai t_{hitung} Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 27,691. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai negatif terhadap Belanja Daerah, hal ini dikarenakan nilai t_{hitung} Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -1,162. Dengan demikian secara parsial atau sendiri Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial atau sendiri tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Daerah.

4.2.5 Analisis Uji F**Tabel 9. Hasil Uji F ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2465969101330488 000000000.000	2	12329845506652440 000000000.000	439.749	.000 ^b
	Residual	2018762885445202 300000000.000	72	28038373408961140 00000.000		
	Total	2667845389875008 500000000.000	74			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), DAK, DAU

Sumber: Hasil pengolahan data, 2016.

Berdasarkan hasil dari tabel 9 di atas menunjukkan F_{hitung} sebesar 439,749 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000, sedangkan F_{tabel} pada tabel distribusi pada tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 3,92. Hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($439,749 > 3,92$) yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum (X_1) dan Dana Alokasi Khusus (X_2) secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y) di Provinsi Sulawesi Utara.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa, Dana Alokasi Umum (DAU) atau (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y) di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2010-2014, hal ini dapat dilihat dari nilai uji t yaitu 27,691 dan nilai signifikansi t yaitu $< 0,05$ atau $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Tri Hartitik (2014) yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian ini berarti, apabila Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan maka akan berdampak juga pada kenaikan dari Belanja

Daerah. Sebaliknya, apabila Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan maka akan terjadi penurunan juga terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) atau (X_2) menunjukkan hasil dengan arah yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y) di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2010-2014, hal ini dapat dilihat dari nilai uji t yaitu -1,162 dan nilai signifikansi t yaitu $> 0,05$ atau $0,249 > 0,05$.

Berdasarkan hasil uji secara simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Dapat dilihat dari hasil uji F_{hitung} sebesar 439,749 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $439,749 > 5,79$. Dengan demikian ini berarti, semakin besar nilai dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan daerah maka akan berdampak pula terhadap pengeluaran pemerintah atau Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang semakin besar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan analisis regresi linear berganda tentang “Pengaruh Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara”, selama tahun anggaran 2010 – 2014 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Secara simultan atau bersamaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut atau mendalam mengenai pengaruh Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah, diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang lebih bervariasi seperti, jenis-jenis penerimaan yang lain ataupun mengenai pertumbuhan ekonomi ataupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi Belanja Daerah.
2. Untuk pemerintah agar tetap meningkatkan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) serta dapat digunakan dengan baik sebagaimana mestinya sehingga, dapat memenuhi kebutuhan Belanja Daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah maka, sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan Dana Alokasi Khusus yang di proporsikan ke Belanja Daerah dan dapat mengelolanya dengan baik. Dana Alokasi Khusus (DAK) salah satunya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana oleh pemerintah, hal ini tentunya menjadi penting untuk pemerintah agar meningkatkan jumlah DAK dari sebelumnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Abdul, 2014. *Makalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)*.
- Erlina, 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. USU Press. Medan.
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

- Hartitik, Tri, 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)*. Jurnal Akuntansi, Februari 2014.
- Hapid, Muh. Halim, Yuli Wulandari, 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Inuwa, Nasiru, 2012. *Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria : Cointegration Analysis*. Academic Research International.
- Nih Luh Dina Selvia Martini, Wayan Cipta, I Wayan Suwendra, 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012*. Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha.
- Prakoso, Rendy, 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riyanto, Puji Agus, 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sunarno, Siswanto, 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cetakan keenam. Sinar Grafika. Jakarta.